

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH

Yumnatul Jannah¹, Sri Wahyuni², Marzalina³

yumna0879@gmail.com¹, sriwahyuni@umuslim.ac.id², linamarza@yahoo.com³

Universitas Al Muslim

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of economic growth and the Provincial Minimum Wage (PMW) on the open unemployment rate in Aceh Province. The research employs a quantitative approach using secondary time-series data obtained from official publications of the Central Statistics Agency (BPS) of Aceh Province. Multiple linear regression analysis is applied to examine the influence of independent variables on the dependent variable, both partially and simultaneously. The results show that, simultaneously, economic growth and the Provincial Minimum Wage do not have a significant effect on the open unemployment rate in Aceh Province. Partially, economic growth exhibits a positive but insignificant relationship with the open unemployment rate, indicating that increases in economic growth have not been able to optimally enhance labor absorption. Meanwhile, the Provincial Minimum Wage shows a negative but insignificant relationship with the open unemployment rate, suggesting that minimum wage policy has not yet produced a measurable impact on changes in unemployment levels in Aceh. The low coefficient of determination indicates that the open unemployment rate in Aceh Province is largely influenced by other structural factors beyond the variables included in this study. Therefore, more inclusive economic development policies oriented toward job creation are required to sustainably reduce open unemployment.

Keywords: Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment, Aceh Province.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang menandakan bahwa kebijakan upah minimum belum memberikan dampak nyata terhadap perubahan tingkat pengangguran di Aceh. Rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural lain di luar variabel penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka Aceh.

PENDAHULUAN

Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di daerah berkembang. Menurut Todaro dan Smith (2020), pengangguran terbuka terjadi ketika angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tidak terserap oleh pasar kerja, yang

mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di Provinsi Aceh, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pengangguran masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,03 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,95 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi sekitar 5,80 persen pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih mencerminkan bahwa pengangguran terbuka di Aceh berada pada level yang relatif tinggi dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Menurut Sukirno (2021), pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Ball, Leigh, dan Loungani (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan output ekonomi cenderung menurunkan pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja.

Studi oleh Pratama dan Hidayat (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang didominasi sektor padat modal cenderung kurang efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjelaskan dinamika ketenagakerjaan di daerah berkembang, termasuk Provinsi Aceh.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran. Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi padat karya. Kondisi ini dapat menimbulkan fenomena *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Fenomena tersebut masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh, yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor-sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang terbatas.

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga memiliki peran penting dalam dinamika pasar tenaga kerja. Menurut International Labour Organization (ILO, 2020), kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dengan memastikan tingkat upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup minimum. Namun demikian, penetapan upah minimum juga berpotensi memengaruhi permintaan tenaga kerja. Borjas (2020) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau menunda perekrutan tenaga kerja baru.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. UMP berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang tidak hanya bertujuan melindungi kesejahteraan tenaga kerja, tetapi

juga memengaruhi dinamika pasar kerja secara lebih luas. Beberapa kajian dalam *review of literature on the impact* menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki keterkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, struktur biaya produksi, serta daya saing tenaga kerja lokal, terutama ketika dihadapkan pada mobilitas dan keberadaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, UMP menjadi variabel penting dalam menganalisis dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Neumark dan Shirley (2021) yang menemukan bahwa kenaikan upah minimum dapat berdampak pada peningkatan pengangguran, terutama pada kelompok tenaga kerja berpendidikan rendah dan pekerja muda. Ketika upah minimum meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja, perusahaan cenderung melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu diselaraskan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha agar tidak menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja.

Provinsi Aceh memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta kebijakan Upah Minimum Provinsi yang terus mengalami penyesuaian setiap tahunnya. Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian ekonomi menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran terbuka tidak selalu dapat dijelaskan hanya oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris menemukan bahwa struktur dan kualitas pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang lebih menentukan dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor-sektor padat modal cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas, sehingga peningkatan output tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menekan tingkat pengangguran terbuka, terutama di daerah yang struktur ekonominya belum terdiversifikasi secara optimal.

Di Provinsi Aceh, pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang cukup serius. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Aceh dalam beberapa tahun terakhir cenderung berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di Aceh belum mampu mengimbangi pertambahan jumlah angkatan kerja. Struktur perekonomian Aceh yang masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu dengan daya serap tenaga kerja yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran terbuka di daerah ini.

Selain itu, kebijakan upah minimum juga memiliki implikasi yang beragam terhadap pasar tenaga kerja. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka, khususnya di daerah yang didominasi oleh sektor informal dan memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka, khususnya di daerah dengan dominasi sektor informal dan produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah (Pratomo & Nugroho, 2021). Temuan ini relevan dengan kondisi perekonomian Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh sektor informal dan usaha

berskala kecil.

KAJIAN LITERATUR

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pengangguran terbuka mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa perekonomian suatu daerah belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang tersedia.

World Bank (2020) menjelaskan bahwa pengangguran yang tinggi di daerah berkembang sering kali berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya investasi. Hal ini relevan dengan kondisi Provinsi Aceh, di mana keterbatasan investasi dan belum optimalnya pengembangan sektor padat karya menyebabkan sebagian angkatan kerja sulit terserap ke dalam pasar kerja formal.

Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam teori ekonomi tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka muncul akibat ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja, maka tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat. Kondisi ini sering terjadi di negara berkembang yang mengalami pertumbuhan penduduk usia kerja yang relatif tinggi.

Teori struktural menjelaskan bahwa pengangguran terbuka tidak hanya disebabkan oleh faktor siklus ekonomi, tetapi juga oleh struktur perekonomian yang belum berkembang secara optimal. Ketergantungan pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah dan keterbatasan diversifikasi ekonomi dapat memperbesar tingkat pengangguran. Selain itu, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (skill mismatch) juga menjadi penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang.

Tingkat pengangguran terbuka juga dipengaruhi oleh faktor struktural dalam perekonomian, seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan investasi

World Bank (2020) menjelaskan bahwa pengangguran yang tinggi di daerah berkembang sering kali berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya investasi. Hal ini relevan dengan kondisi Provinsi Aceh, di mana keterbatasan investasi dan belum optimalnya pengembangan sektor padat karya menyebabkan sebagian angkatan kerja sulit terserap ke dalam pasar kerja formal.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Sukirno (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Secara teoritis, hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dijelaskan melalui Hukum Okun.

Teori kualitas pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa bukan hanya besarnya pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi juga struktur dan karakteristik pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor padat karya diyakini memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan pengangguran dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor padat modal. Oleh karena itu, pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang luas.

Dalam konteks ekonomi regional, kualitas pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral, tingkat investasi, serta kemampuan daerah dalam mengembangkan sektor industri dan jasa. Daerah yang gagal mengembangkan sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Hubungan ini dikenal sebagai Hukum Okun, yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan output akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran (Okun, 1962). Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja baru, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Ball, Leigh, dan Loungani (2022).

Namun, dalam perkembangan teori ekonomi modern, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak selalu bersifat linier. Teori jobless growth menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Hal ini biasanya disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin intensif modal, otomatisasi, dan efisiensi produksi, sehingga peningkatan output tidak membutuhkan tambahan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomenanya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Fenomena itu terjadi ketika peningkatan output ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor-sektor padat modal yang memiliki daya serap tenaga kerja rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menurunkan tingkat pengangguran. Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan tidak berorientasi pada sektor padat karya cenderung menghasilkan peningkatan PDRB tanpa diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ball, Leigh, dan Loungani (2022) yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran dapat melemah ketika struktur ekonomi tidak mendukung penciptaan lapangan kerja.

Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal cenderung kurang efektif dalam menyerap tenaga kerja. Dalam konteks Aceh, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh sektor-sektor tertentu yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menyebabkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan pengangguran menjadi relatif lemah.

OECD (2021) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada sektor padat karya memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka di Provinsi Aceh

Hasil penelitian oleh Sari dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi oleh ekspansi sektor padat karya berpotensi menimbulkan fenomena . Kondisi ini menyebabkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto tidak secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, struktur sektor ekonomi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.

Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena itu , yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Fenomena terjadi ketika peningkatan output ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor-sektor padat modal yang

memiliki daya serap tenaga kerja rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menurunkan tingkat pengangguran. Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan tidak berorientasi pada sektor padat karya cenderung menghasilkan peningkatan PDRB tanpa diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ball, Leigh, dan Loungani (2022) yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran dapat melemah ketika struktur ekonomi tidak mendukung penciptaan lapangan kerja.

Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal cenderung kurang efektif dalam menyerap tenaga kerja. Dalam konteks Aceh, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh sektor-sektor tertentu yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menyebabkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan pengangguran menjadi relatif lemah.

OECD (2021) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada sektor padat karya memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Secara teoretis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dijelaskan melalui Hukum Okun (Okun's Law). Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan output dan tingkat pengangguran, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru (Ball, Leigh, & Loungani, 2022). Namun, efektivitas hubungan tersebut sangat bergantung pada struktur perekonomian dan sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor padat modal, maka peningkatan output tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi menimbulkan fenomena *jobless growth*, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi terjadi tanpa diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Fenomena ini sering ditemukan di daerah berkembang yang struktur ekonominya masih bergantung pada sektor primer dan sektor dengan produktivitas tenaga kerja rendah. Dalam kondisi tersebut, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih banyak disumbang oleh efisiensi teknologi dan modal, bukan oleh peningkatan penggunaan tenaga kerja.

Upah Minimum Provinsi dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh upah yang layak. International Labour Organization (ILO, 2020) menyatakan bahwa kebijakan upah minimum ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup minimum bagi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Di Provinsi Aceh, Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, kenaikan UMP tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi dunia usaha, khususnya perusahaan berskala kecil dan menengah. Borjas (2020) menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja.

Neumark dan Shirley (2021) menyebutkan bahwa dampak kenaikan upah minimum terhadap pengangguran lebih terasa di daerah dengan produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah. Kondisi ini relevan dengan Aceh, di mana sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal dan memiliki tingkat produktivitas yang belum optimal. Akibatnya, kenaikan UMP berpotensi mendorong perusahaan untuk menekan jumlah tenaga kerja atau

menunda perekrutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

BPS (2022) juga menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif kenaikan upah minimum. Oleh karena itu, kebijakan UMP di Provinsi Aceh perlu diselaraskan dengan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan dunia usaha agar tidak menghambat penyerapan tenaga kerja.

Secara teoritis, hubungan antara Upah Minimum Provinsi dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui teori pasar tenaga kerja. Dalam pendekatan neoklasik, upah dipandang sebagai harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kenaikan upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, sehingga dapat menurunkan permintaan tenaga kerja dan mendorong terjadinya pengangguran (Borjas, 2020). Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja atau menunda perekrutan tenaga kerja baru.

Namun demikian, pandangan tersebut tidak selalu berlaku dalam semua kondisi pasar tenaga kerja. Teori upah efisiensi menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, loyalitas pekerja, serta menurunkan tingkat pergantian tenaga kerja (turnover). Menurut International Labour Organization (2020), upah yang layak dapat meningkatkan motivasi kerja dan kualitas kinerja tenaga kerja, sehingga dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga stabilitas kesempatan kerja.

Dampak kebijakan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja di suatu daerah. Neumark dan Shirley (2021) menyatakan bahwa di wilayah dengan dominasi sektor informal yang tinggi, perubahan upah minimum cenderung memiliki pengaruh yang lebih lemah terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja tidak sepenuhnya terikat pada regulasi upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan Upah Minimum Provinsi merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sementara kebijakan upah minimum berperan dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Namun, apabila kenaikan UMP tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan sektor padat karya, maka dampaknya justru dapat meningkatkan pengangguran.

World Bank (2021) menegaskan bahwa penurunan pengangguran memerlukan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif. Dalam konteks Provinsi Aceh, fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian UMP setiap tahun diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh menjadi penting untuk memberikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Secara konseptual, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan Upah Minimum Provinsi dalam struktur pasar tenaga kerja daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teoritis diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan aktivitas produksi dan investasi. Namun, dalam konteks Aceh, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya

bersifat inklusif karena masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu yang memiliki daya serap tenaga kerja terbatas. Kondisi ini menyebabkan peningkatan output ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui fenomena *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor padat modal dibandingkan sektor padat karya. Dalam kondisi tersebut, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka cenderung tetap tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat.

Di sisi lain, kebijakan Upah Minimum Provinsi memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Kenaikan Upah Minimum Provinsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, namun dampaknya terhadap pengangguran sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha. Di Provinsi Aceh, dominasi sektor informal menyebabkan kebijakan upah minimum tidak sepenuhnya mengikat seluruh tenaga kerja, sehingga pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka menjadi relatif lemah.

Interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan Upah Minimum Provinsi juga menentukan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi oleh kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi memperlemah dampak positif pertumbuhan terhadap penurunan pengangguran. World Bank (2021) menegaskan bahwa penurunan pengangguran memerlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, didukung oleh kebijakan upah yang sejalan dengan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan sektor padat karya.

Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tidak bersifat sederhana dan linier. Tingkat pengangguran terbuka lebih dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan ekonomi, struktur sektor usaha, serta karakteristik pasar tenaga kerja daerah. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh, serta menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Secara deskriptif, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh cenderung berfluktuasi dan berada di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan masih terbatasnya kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga menunjukkan pola yang tidak stabil, dipengaruhi oleh kondisi sektoral, investasi, serta ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki daya serap tenaga kerja terbatas. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi di Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun kenaikan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) dengan periode pengamatan tahun 1995–2024. Data penelitian mencakup tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum

Provinsi di Provinsi Aceh dalam periode tertentu. Data tersebut diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, serta sumber pendukung lainnya yang relevan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel independennya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Tingkat pengangguran terbuka diukur dalam satuan persentase, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedangkan Upah Minimum Provinsi diukur dalam satuan rupiah per tahun.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \alpha_0 + \alpha_1 PE + \alpha_2 UMP + \varepsilon$$

di mana TPT adalah tingkat pengangguran terbuka, PE adalah pertumbuhan ekonomi, UMP adalah Upah Minimum Provinsi, α merupakan konstanta, α_1 dan α_2 adalah koefisien regresi, serta ε adalah error term.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Seluruh proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26, yang digunakan untuk melakukan analisis statistik deskriptif, estimasi regresi linier berganda, serta pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Penggunaan perangkat lunak ini bertujuan untuk memastikan hasil analisis yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh selama periode penelitian 1995–2024, diperoleh gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi (PE), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai berikut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dengan nilai minimum sebesar 4,80 persen dan nilai maksimum mencapai 10,30 persen, serta nilai rata-rata sebesar 7,41 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Aceh tergolong relatif tinggi dan mencerminkan masih terbatasnya kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi (PE) Provinsi Aceh selama periode penelitian juga mengalami fluktuasi. Nilai pertumbuhan ekonomi terendah tercatat sebesar -0,72 persen, sedangkan nilai tertinggi mencapai 9,35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67 persen. Meskipun pada beberapa periode pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, kondisi tersebut belum diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran

Terbuka secara signifikan.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai UMP terendah tercatat sebesar Rp172.500, sedangkan nilai tertinggi mencapai Rp3.460.672, dengan rata-rata sebesar Rp1.768.945. Peningkatan UMP ini mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, namun belum menunjukkan dampak langsung terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil estimasi regresi linier berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,087 menunjukkan bahwa hanya 8,7 persen variasi Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi, sedangkan 91,3 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (berdasarkan data BPS Provinsi Aceh tahun 1994–2024)

Variabel	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,80	10,30	7,41
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Persen	-0,72	9,35	4,67
Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rupiah	172.500	3.460.672	1.768.945

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, data diolah.

Meskipun pada beberapa periode terjadi penurunan tingkat pengangguran, secara umum permasalahan pengangguran terbuka masih menjadi isu struktural di Provinsi Aceh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian Upah Minimum Provinsi belum sepenuhnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi menunjukkan tren meningkat secara signifikan, dengan nilai minimum sebesar Rp172.500 dan nilai maksimum sebesar Rp3.460.672, serta nilai rata-rata sebesar Rp1.768.945. Peningkatan UMP ini mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

Setelah disajikan statistik deskriptif, analisis dilanjutkan dengan estimasi regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Hasil estimasi regresi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien	Probabilitas
Konstanta	804,84	—
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0,0085	0,964
Upah Minimum Provinsi (UMP)	-0,000038	0,486

Sumber: Output SPSS 26, data diolah.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TPT = 804,84 + 0,0085 PE - 0,000038 UMP$$

Koefisien pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0,0085, yang menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Namun, nilai probabilitas sebesar 0,964 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Sementara itu, koefisien Upah Minimum Provinsi bernilai negatif sebesar $-0,000038$, yang mengindikasikan bahwa kenaikan UMP cenderung menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Akan tetapi, nilai probabilitas sebesar $0,486$ menunjukkan bahwa pengaruh UMP terhadap tingkat pengangguran terbuka juga tidak signifikan secara statistik.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat pengangguran terbuka, dilakukan uji F dan pengujian koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel.3.

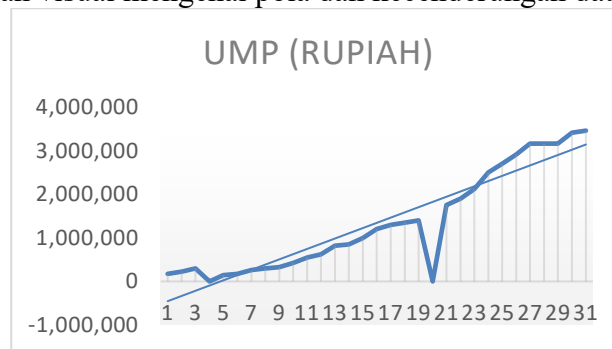
Tabel 3 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai
R-Square (R^2)	0,087
Probabilitas F-statistik	0,321
Tingkat Signifikansi	0,05

Sumber: Output SPSS 26, data diolah.

Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,321$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,087$ mengindikasikan bahwa model regresi hanya mampu menjelaskan $8,7$ persen variasi tingkat pengangguran terbuka, sedangkan sebesar $91,3$ persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Selain disajikan dalam bentuk tabel, perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh selama periode penelitian juga disajikan dalam bentuk grafik untuk memberikan gambaran visual mengenai pola dan kecenderungan data.



Pembahasan

Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal. Data Aceh memperlihatkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun mencapai tingkat yang relatif tinggi, tingkat pengangguran terbuka tidak mengalami penurunan yang sebanding. Hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena itu, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif, meskipun kecil dan tidak signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Aceh cenderung tidak diarahkan pada sektor-sektor padat karya. Pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode penelitian lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja terbatas, sehingga dampaknya terhadap pengurangan pengangguran menjadi lemah. Temuan ini sejalan dengan Kuncoro (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal memiliki kontribusi yang rendah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meskipun koefisien UMP bernilai negatif, yang secara teoritis menunjukkan bahwa kenaikan UMP dapat menurunkan

pengangguran, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan UMP di Provinsi Aceh belum menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika pengangguran terbuka.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pasar tenaga kerja di Aceh yang masih didominasi oleh sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja tidak sepenuhnya terikat pada kebijakan upah minimum, sehingga perubahan UMP tidak berdampak langsung terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kenaikan UMP di Aceh relatif masih berada dalam batas kemampuan dunia usaha, sehingga tidak mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja secara signifikan.

Nilai R^2 yang rendah memperkuat dugaan bahwa pengangguran terbuka di Provinsi Aceh lebih dipengaruhi oleh faktor struktural lainnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan investasi, serta kurang berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa modern diduga memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini sejalan dengan World Bank (2021) yang menegaskan bahwa penurunan pengangguran memerlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan sektor-sektor padat karya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian Upah Minimum Provinsi saja belum cukup untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan iklim investasi daerah agar penurunan pengangguran dapat tercapai secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Secara empiris, nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 0,087 mengindikasikan bahwa dinamika pengangguran terbuka di Aceh sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel yang diteliti. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Aceh bersifat struktural dan tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum.

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif sebesar 0,0085, meskipun tidak signifikan, memberikan indikasi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Aceh belum mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Fenomena ini mengarah pada kondisi *jobless growth*, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung bertumpu pada sektor-sektor tertentu yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB tetapi relatif rendah dalam menyerap tenaga kerja. Kondisi ini memperkuat pandangan Kuncoro (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif memiliki dampak terbatas terhadap penurunan pengangguran.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi tidak serta-merta menciptakan peluang kerja baru bagi angkatan kerja di Aceh. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas tenaga kerja yang tersedia menjadi salah satu faktor yang menjelaskan lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berbasis pada pengembangan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di sisi lain, koefisien Upah Minimum Provinsi yang bernilai negatif sebesar -0,000038 menunjukkan bahwa kenaikan UMP cenderung menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan UMP di Aceh belum menjadi faktor penentu

dalam dinamika pengangguran terbuka. Salah satu penyebabnya adalah dominasi sektor informal yang cukup besar, sehingga sebagian tenaga kerja tidak terikat langsung dengan kebijakan upah minimum.

Selain itu, besarnya konstanta dalam model regresi yang mencapai 804,84 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh kuat dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, minimnya investasi swasta, serta kurang berkembangnya sektor industri dan jasa modern memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (2021) yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan iklim investasi dalam menurunkan pengangguran.

Diskusi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Aceh perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, seperti pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Tanpa kebijakan pendukung tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian upah minimum cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pengangguran terbuka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah bahwa upaya penurunan pengangguran terbuka di Provinsi Aceh memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan ketenagakerjaan perlu disinergikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bersifat inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada kedua variabel tersebut belum mampu menjelaskan secara kuat dinamika pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Meskipun arah hubungan yang dihasilkan bersifat positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh cenderung belum bersifat inklusif dan masih didominasi oleh sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja yang rendah.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Meskipun hasil estimasi menunjukkan hubungan negatif antara UMP dan pengangguran terbuka, kebijakan upah minimum belum memberikan dampak nyata terhadap perubahan tingkat pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan UMP belum menjadi instrumen utama dalam mengendalikan pengangguran terbuka di Aceh, terutama karena dominasi sektor informal dan karakteristik pasar tenaga kerja daerah.

Rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural lainnya di luar variabel penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta iklim investasi. Oleh karena itu,

upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Wahyuni, S., & Asrida. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim*, 16(1), 7–13.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Aceh. BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Aceh dalam angka 2022. BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Aceh. BPS Provinsi Aceh.
- Ball, L., Leigh, D., & Loungani, P. (2022). Okun's law: Fit at fifty? *Journal of Money, Credit and Banking*, 54(1), 141–173.
- Blanchard, O., & Johnson, D. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Blinder, A. S., & Krueger, A. B. (2019). Alternative measures of unemployment. *Journal of Labor Economics*, 37(S1), S141–S175.
- Borjas, G. J. (2020). *Labor economics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Cahuc, P., Carcillo, S., & Zylberberg, A. (2021). *Labor economics* (3rd ed.). MIT Press.
- Card, D., & Krueger, A. B. (2018). Minimum wages and employment. *American Economic Review*, 108(8), 231–247.
- Davis, S. J., & Haltiwanger, J. (2019). Labor market fluidity and economic performance. *Economic Policy*, 34(97), 5–53.
- Fields, G. S. (2019). Employment and economic growth. *Oxford Development Studies*, 47(3), 257–271.
- Fitriani, R., & Hidayat, M. (2022). Pengaruh UMP dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka. *Jurnal Ekonomi Regional*, 17(2), 89–103.
- Gindling, T. H., & Terrell, K. (2018). Minimum wages and employment. *ILR Review*, 71(2), 351–386.
- International Labour Organization. (2020). *Global wage report 2020–21*. ILO.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (2019). *The economics of labor markets* (9th ed.). Cengage Learning.
- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomika pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Neumark, D., & Shirley, P. (2021). Myth or measurement? What does the new minimum wage research say about minimum wages and job loss in the United States? *Industrial Relations*, 60(4), 555–595.
- OECD. (2021). *OECD employment outlook 2021*. OECD Publishing.
- Pratomo, D. S., & Nugroho, R. (2021). Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 45–60.
- Rama, M., & Tabellini, G. (2020). The role of labor institutions in development. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 3–30.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2020). Economic growth and unemployment dynamics in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 123–142.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Wahyuni, S., Bachtiar, N., Elfindri and Ridwan, E. (2019) 'Review of literature on the impact of foreign workers on wages', *EAI Proceedings of the 1st Workshop on Multimedia Education, Learning, Assessment and its Implementation in Game and Gamification (WMA-1 2018)*, pp. 98–111. doi: 10.4108/eai.20-1-2018.2282081.
- Windari, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 65–78.
- World Bank. (2020). *Jobs and structural change in developing regions*. World Bank Publications.

- World Bank. (2021). World development report 2021: Data for better lives. World Bank Publications.
- Yusuf, A., & Rahman, F. (2020). Pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja regional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 12(2), 55–70.